

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sistem otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kebijakan otonomi diharapkan akan lebih mampu mengacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam proses implementasi pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber peningkatan daerah lainnya dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam upaya memenuhi kebutuhan finansialnya baik untuk membiayai kebutuhan pemerintahan maupun untuk pembangunan, Pemerintah Daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menggali potensi daerah sebagai sumber-sumber keuangan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang didapatkan melalui pungutan yang berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2004.

Informasi tentang keuangan daerah yang mencerminkan gambaran perkembangan ataupun tingkat pertumbuhan target dan realisasi anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran serta hasil analisis keuangannya merupakan informasi yang sangat penting terutama dalam hal penentuan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta mampu menilai kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dapat dilaksanakan suatu evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah yang akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam periode lima tahun terakhir. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting dilakukan untuk menilai kemampuan/akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan adanya peningkatan (pertumbuhan) keuangan daerah baik dari segi penerimaan maupun segi pembelanjaan.

Banyak *proxy* penghitungan yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah, namun untuk mengukur tingkat kontribusi dan pertumbuhan PAD maka disini peneliti hanya menetapkan *proxy* penghitungan kontribusi dan rasio pertumbuhan PAD.

Biasanya penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, kadang mengalami kenaikan kadang pula mengalami penurunan. Minimnya penerimaan PAD memberikan bukti bahwa masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pusat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan untuk itu digunakan *proxy* perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*. *Share* adalah rasio yang mengukur perbandingan antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Rasio ini akan memberikan gambaran seberapa besar kontribusi PAD terhadap TPD, sehingga bias dilihat kapasitas kemampuan keuangan daerah. Sedangkan *growth* merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula sehingga penerimaan PAD menjadi semakin tinggi. Apabila semakin tinggi nilai PAD terhadap TPD, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya demikian sebaliknya.

Sebagaimana data yang penulis peroleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tojo Una-Una dalam 5 (lima) tahun terakhir diperoleh gambaran penerimaan daerah sesuai data pada table berikut :

Tabel 1.1.  
Realisasi Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Tojo Una-Una  
Tahun 2015 – 2019

No	Sumber Penerimaan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.795.450.535	47.872.215.620	75.654.832.269	61.206.540.981	75.800.818.930
2	Dana Perimbangan	845.423.655.354	1.007.479.217.303	750.356.885.746	763.486.382.764	882.547.761.646
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	14.617.058.750	6.631.938.284	135.554.404.150	183.751.098.576	178.444.508.300
	Jumlah	905.836.164.639	1.061.983.371.207	961.566.122.165	1.008.444.022.321	1.136.793.088.876

Sumber : LKPJ Kab. Tojo Una-Una

Sesuai dengan uraian di atas maka penilaian atas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu dilakukan sebagai evaluasi pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan. Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Tojo Una-Una “**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015-2019.

- b. Berapa besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015-2019.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui besarnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015-2019.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus kepada :

- a. Bagi pemerintah daerah, sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Bagi Akademisi, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi sektor publik.
- c. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.